

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
POLITIK PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU PRESIDEN
TAHUN 2019 DI KOTA PALEMBANG**

M.Gilang Fajari agus

NPP. 31.0227

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Politik Indonesia Terapan

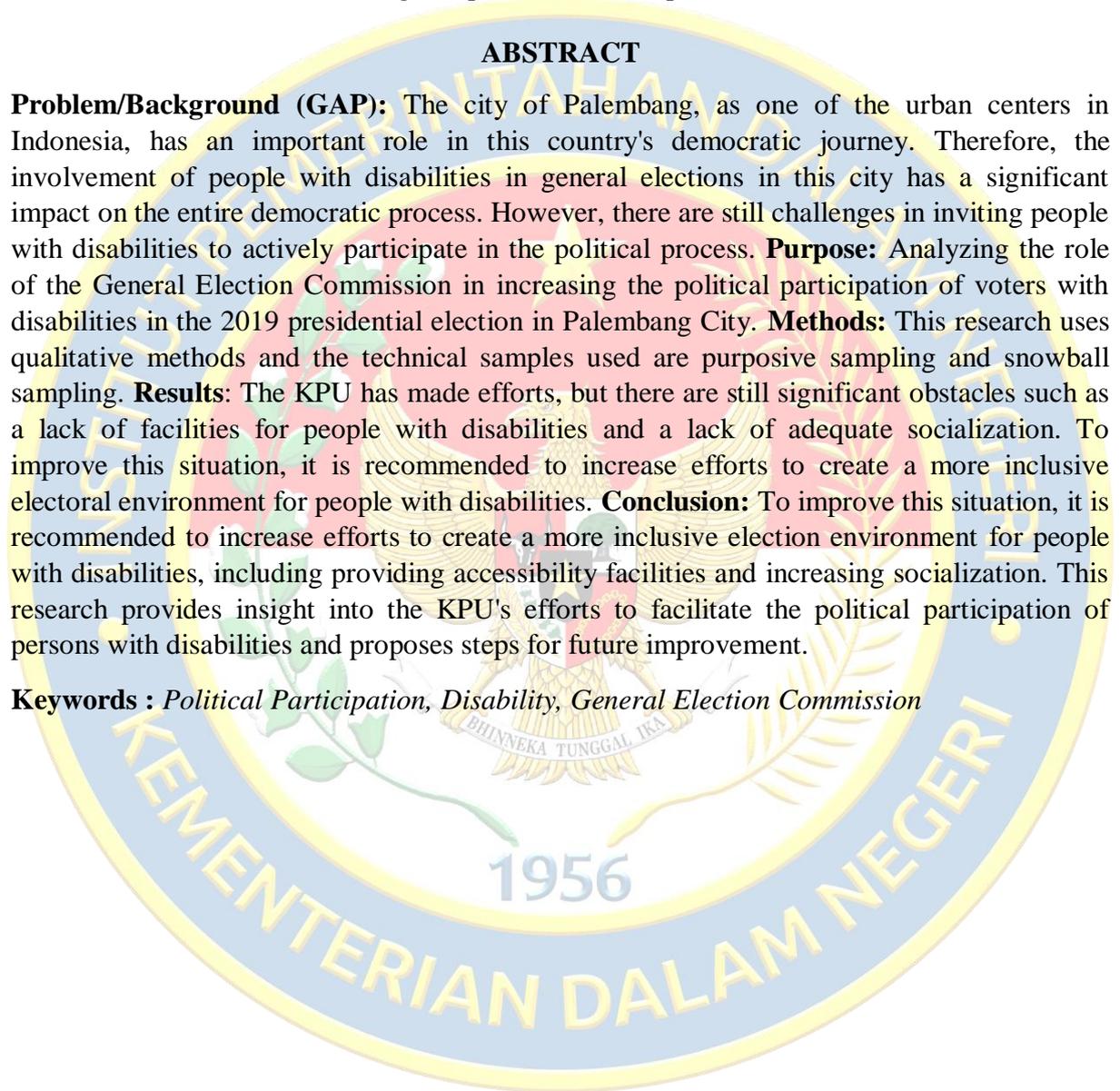
Email: fajarigilang@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Gasper Liauw, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The city of Palembang, as one of the urban centers in Indonesia, has an important role in this country's democratic journey. Therefore, the involvement of people with disabilities in general elections in this city has a significant impact on the entire democratic process. However, there are still challenges in inviting people with disabilities to actively participate in the political process. **Purpose:** Analyzing the role of the General Election Commission in increasing the political participation of voters with disabilities in the 2019 presidential election in Palembang City. **Methods:** This research uses qualitative methods and the technical samples used are purposive sampling and snowball sampling. **Results:** The KPU has made efforts, but there are still significant obstacles such as a lack of facilities for people with disabilities and a lack of adequate socialization. To improve this situation, it is recommended to increase efforts to create a more inclusive electoral environment for people with disabilities. **Conclusion:** To improve this situation, it is recommended to increase efforts to create a more inclusive election environment for people with disabilities, including providing accessibility facilities and increasing socialization. This research provides insight into the KPU's efforts to facilitate the political participation of persons with disabilities and proposes steps for future improvement.

Keywords : *Political Participation, Disability, General Election Commission*



ABSTRAK

Permasalahan(GAP): Kota Palembang, sebagai salah satu pusat perkotaan di Indonesia, memiliki peran penting dalam perjalanan demokrasi Negara ini. Oleh karena itu, keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di kota ini memiliki dampak yang signifikan pada keseluruhan proses demokrasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengajak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif terhadap proses politik. **Tujuan:** Menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilu presiden tahun 2019 di Kota Palembang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kemudian teknis sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dan *snowball sampling*. **Hasil/Temuan:** KPU telah berupaya, namun masih ada kendala signifikan seperti kurangnya fasilitas untuk disabilitas dan kurangnya sosialisasi yang memadai. Untuk memperbaiki situasi ini, disarankan meningkatkan upaya menciptakan lingkungan pemilihan umum yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. **Kesimpulan:** Untuk memperbaiki situasi ini, disarankan meningkatkan upaya menciptakan lingkungan pemilihan umum yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan peningkatan sosialisasi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang upaya KPU dalam memfasilitasi partisipasi politik penyandang disabilitas dan mengusulkan langkah-langkah untuk perbaikan ke depannya.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Disabilitas, Komisi Pemilihan Umum

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dikenal sebagai lembaga independen dan nonpartisan. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan memastikan terbentuknya pemerintahan yang demokratis. Kualitas Pemilu dapat terjamin ketika prosesnya dilaksanakan dengan integritas yang tinggi, serta memperhatikan serta menghormati hak-hak sipil dan politik warga negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU memiliki kewenangan untuk mengatur Pemilu presiden, wakil presiden, legislatif, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Menurut Miriam Budiardjo (2008), “partisipasi politik adalah suatu kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berperan serta secara aktif dalam kehidupan politik, juga melalui pemilihan kepala negara secara langsung atau tidak langsung dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah(Miriam,2008)

Good governance sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta (prokomsetda.bulelengkab.go.id,2017).

Masyarakat madani dapat dimaknai sebagai suatu sistem masyarakat yang memiliki kemandirian serta kompetensi untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memegang prinsip moral yang berlaku. Masyarakat madani merupakan puncak tertinggi dari keberhasilan demokrasi di suatu negara karena kelompok ini akan terbentuk bila terdapat hak dan kebebasan yang sama untuk berpendapat di ruang publik, toleransi di dalam kemajemukan, keadilan dan kemakmuran (Nasution, 2016).

Keterlibatan dan kontribusi yang aktif dari masyarakat sebagai penggerak demokrasi menjadi elemen penting dalam kesuksesan program ini dalam menjalankan pendidikan politik

bagi pemilih. Peran ini diharapkan dapat mengembangkan budaya dan etika dalam masyarakat terkait tanggung jawab mereka serta kesadaran penuh terhadap proses demokrasi secara efektif. Demi mewujudkan itu semua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menganalisis kendala-kendala yang ada di lapangan. Pada saat berupaya meningkatkan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks pemilihan umum di Kota Palembang, beberapa tantangan signifikan dihadapi oleh penyandang disabilitas. Pertama, tempat pemungutan suara dan fasilitas lainnya tidak sepenuhnya memenuhi standar ramah bagi penyandang disabilitas. Fasilitas ini tidak sesuai dengan kebutuhan khusus yang dibutuhkan oleh individu penyandang disabilitas. Kedua, informasi terkait proses pemilihan, calon, dan isu-isu politik tidak disajikan dalam format yang dapat diakses oleh berbagai jenis disabilitas, mengakibatkan keterbatasan akses informasi. Ketiga, infrastruktur yang mendukung penyandang disabilitas di Kota Palembang masih minim, hal ini mempengaruhi aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas yang sesuai. Keempat, akses menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi kendala bagi kaum penyandang disabilitas, karena kurangnya aksesibilitas yang memadai. Terakhir, terdapat kekurangan dalam pelatihan petugas pemilihan yang sangat penting bagi penyandang disabilitas, yang dapat membantu dalam memberikan dukungan dan layanan yang sesuai. Dengan mengidentifikasi berbagai kendala ini, dapat ditingkatkan upaya untuk menciptakan pemilihan umum yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas di Kota Palembang.

Peran KPU sangat dibutuhkan bagi penyandang disabilitas, untuk membuka ruang bagi mereka untuk menyalurkan haknya. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan fokus mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut melalui sebuah penelitian yang berjudul **“PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA PALEMBANG”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Dalam konteks pemilihan umum di Kota Palembang, beberapa tantangan signifikan dihadapi oleh penyandang disabilitas. Pertama, tempat pemungutan suara dan fasilitas lainnya tidak sepenuhnya memenuhi standar ramah bagi penyandang disabilitas. Fasilitas ini tidak sesuai dengan kebutuhan khusus yang dibutuhkan oleh individu penyandang disabilitas. Kedua, informasi terkait proses pemilihan, calon, dan isu-isu politik tidak disajikan dalam format yang dapat diakses oleh berbagai jenis disabilitas, mengakibatkan keterbatasan akses informasi. Ketiga, infrastruktur yang mendukung penyandang disabilitas di Kota Palembang masih minim, hal ini mempengaruhi aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas yang sesuai. Keempat, akses menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi kendala bagi kaum penyandang disabilitas, karena kurangnya aksesibilitas yang memadai. Terakhir, terdapat kekurangan dalam pelatihan petugas pemilihan yang sangat penting bagi penyandang disabilitas, yang dapat membantu dalam memberikan dukungan dan layanan yang sesuai.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis dalam karya ilmiah sebagai bahan perbandingan serta sekaligus menjadi pedoman penulis. Penelitian Maria Desti berjudul *Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung* (Maria, 2016), menemukan bahwa Pemberian informasi pemilukada yang dilakukan oleh KPU yaitu melalui iklan masyarakat, penyampaian sosialisasi tatap muka, penyediaan interpreter dan simulasi langsung pemilukada. Penelitian Nizar Nazlia berjudul *Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)* (Nizar, 2019), menemukan bahwa Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di kota Medan sejauh ini dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di kota Medan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan sebenarnya sudah ada pelaksanaannya seperti, Menggelar Forum Diskusi Bersama penyandang Disabilitas, Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian Amalia Stefani, *Peran dan Upaya KPU Provinsi DKI Jakarta Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada PILKADA Jakarta 2017* (Amalia, 2017), mengungkapkan bahwa peran dan upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan partisipasi politik

penyandang disabilitas di pilkada Jakarta 2017 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penulisan yang di lakukan yaitu Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Kota Palembang. Penelitian yang di lakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baru.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilu presiden tahun 2019 di Kota Palembang dan Menganalisis faktor penghambat dan pendukung Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilu presiden tahun 2019 di Kota Palembang.

II METODE

Pendekatan yang diterapkan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang mengikuti metode induktif. Penelitian kualitatif ini berakar pada pendekatan positivisme filosofis, yang bertujuan untuk mengkaji sampel atau populasi, melibatkan instrumen penelitian dalam proses pengumpulan data, dan menganalisis data secara kualitatif, tanpa menguji hipotesis (Sugiyono, 2008).

Menurut Moh. Nazir, Kualitatif Deskriptif adalah langkah interpretasi dalam mengungkapkan sebuah realita, memahami permasalahan dalam masyarakat, hubungan yang muncul dari konteks dan situasi, sikap serta perilaku, dan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fenomena tertentu (Nazir, 2009).

Dalam pandangan Moleong, pendekatan deskriptif kualitatif merujuk pada metode penelitian dimana data yang terkumpul terdiri dari teks, ilustrasi visual seperti gambar, dan bukan data berbentuk angka. Data-data ini diperoleh melalui proses wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman video, dokumen pribadi, catatan, atau dokumen lainnya(Moleong, 2005).

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

peneliti tertarik untuk mengeksplorasi peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Palembang, khususnya di kalangan pemilih penyandang disabilitas yang seringkali merasa bahwa suara mereka tidak berpengaruh dalam hasil pemilihan umum. Peneliti akan menggunakan Teori Peran (Biddle & Thomas, 1966) sebagai alat analisis. Fokus teori peran ini adalah harapan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan dan posisi terhadap perilaku dan tindakan yang mencakup tugas dan fungsi mereka, terutama terkait pelaksanaan hak dan kewajiban. Biddle dan Thomas mengelompokkan teori peran berdasarkan beberapa Dimensi, yaitu: (a) Harapan(Expectation); (b) Norma (Norm); (c) Pelaksanaan Praktis (Performance); (d) Penilaian (Evaluation); dan Sanksi (Sanction). Oleh karena itu, peneliti akan mengarahkan fokusnya pada analisis peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas di Kota Palembang pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, dengan mempertimbangkan setiap dimensi dari teori peran tersebut.

3.1 Dimensi Teori Peran

Riyadi mendefinisikan peran sebagai sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk disebabkan karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal tersebut didasari pada individu dan juga alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan (Suhardono, 1994). Setelah itu, Abu Ahmadi menjelaskan mengenai peran sebagai sekumpulan harapan yang dimiliki manusia terkait dengan perilaku dan tindakan individu dalam situasi tertentu berdasarkan kedudukan dan peran sosialnya (Ahmadi, 1982). Soerjono Soekanto mengartikan peran sebagai bagian yang dinamis dari posisi (status), dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, yaitu melaksanakan perannya (UNPAS, 2002).

3.1.1 Harapan

Kaitan antara harapan dan peran terjadi karena kelompok masyarakat memiliki harapan terhadap individu yang memegang kekuasaan atau posisi tertentu, dimana harapan tersebut bertujuan untuk mendukung perilaku yang etis. Harapan (hope) adalah persepsi atau pemikiran individu dalam mengonseptualisasikan tujuan (goal) secara jelas, dengan menjadikan motivasi untuk meraih tujuan (agency), dan upaya mengembangkan strategi spesifik untuk mencapai tujuan tersebut di masa depan (pathways). Harapan merupakan keseluruhan daya kehendak dan strategi yang terbentuk dari pengalaman, serta digunakan oleh individu untuk mencapai sasaran di masa yang akan datang (Muchlisin, 2022).

3.1.2 Norma

Craig Calhoun merupakan sosiologis asal Amerika menyatakan, norma baginya merupakan suatu pedoman maupun aturan yang menyatakan bagaimana seorang individu seharusnya bertindak di dalam suatu situasi ditengah masyarakat (Vanya, 2022).

Norma merupakan hasil dari beragam aspirasi masyarakat yang berbentuk harapan-harapan yang mereka miliki. Secord dan Backman mengelompokkan harapan-harapan ini menjadi dua kategori, yaitu: (a) Harapan antisipatif, yang berhubungan dengan perkiraan tentang masa depan, dan (b) Harapan Normatif, yang berkaitan dengan peran yang dianggap

wajib dilaksanakan dan memunculkan harapan dalam masyarakat. Dua tipe harapan normatif meliputi, pertama, harapan yang tersirat yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban, seperti kewajiban seorang ibu untuk merawat dan mendidik anaknya. Kedua, harapan yang tereksplisit, yang muncul karena adanya perintah tertentu, seperti seorang guru yang memerintahkan muridnya untuk belajar dengan rajin agar bisa mencapai prestasi yang baik.

3.1.3 Wujud Perilaku

menurut Warsah & Daheri (2021, hlm. 12) maksud utama bidang studi psikologi adalah untuk mengetahui pola tingkah laku manusia, bukan hanya untuk digeneralisasi, melainkan lebih dari itu, yakni untuk mengetahui sejauh mana seseorang itu berbeda dari yang lain atau sejauh mana manusia itu unik (Gamal, 2022)

Perilaku mengacu pada tindakan atau respons yang dimanifestasikan oleh individu, kelompok, atau organisme terhadap stimulus tertentu di lingkungan mereka. Ini meliputi segala sesuatu yang dilakukan atau dipertunjukkan oleh seseorang, baik itu tindakan fisik maupun non-fisik, serta reaksi terhadap situasi, peristiwa, atau kondisi tertentu (Renita, 2024).

Peran bisa terlihat melalui tindakan yang kita lakukan. Sebagai contoh, seorang dosen seharusnya mampu mengajar mahasiswanya, tetapi terkadang beberapa dosen tidak dapat memberikan pengajaran yang memadai karena keterlibatan dalam aktivitas pribadi mereka.

3.1.4 Penilaian dan Sanksi

Sireger dan Nara (2011) Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumentasi ataupun Non tes (Dewanto, 2020)

Penilaian peran merujuk pada atribusi prestasi yang diberikan kepada peran individu berdasarkan penilaian masyarakat. Sementara itu, sanksi merujuk pada upaya yang muncul karena dorongan untuk mempertahankan atau mencapai penilaian positif terhadap peran yang dijalankan.

Sanksi adalah istilah yang luas dengan makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Sanksi dapat berupa batasan, tergantung pada konteksnya, karena kata tersebut adalah antonim dari otomatis. Sanksi dapat diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Bila berkaitan dengan perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang memiliki tugas untuk mempertahankan tata tertib masyarakat (Abdul,2024).

Pemilihan teori peran Biddle dan Thomas sebagai teori utama dalam penelitian ini dipandang relevan karena dapat memahami peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Selain itu, peneliti menggunakan teori peran ini secara spesifik untuk mendalami pemahaman tentang peran Komisi Pemilihan Umum sebagai mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama penyandang disabilitas, baik dari perspektif peran lembaga sebagai pelaku maupun peran individu sebagai komunikator dalam sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk mengklarifikasi peran yang dimainkan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas.

3.2 Faktor penghambat dan pendukung Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilu presiden tahun 2019 di Kota Palembang.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kota Palembang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran sentral dalam merangsang dan mengubah perilaku pemilih, penulis

memecahkan permasalahan dengan menggunakan factor-faktor penghambat dan pendukung Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilu presiden tahun 2019 di Kota Palembang, Adapun Faktor tersebut menjadi dua yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung.

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memengaruhi upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kota Palembang. Pertama, regulasi dan kebijakan yang mendukung hak politik penyandang disabilitas menjadi pendorong utama. KPU Palembang terdorong untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut, termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas di tempat pemungutan suara. Kedua, adanya kesadaran akan pentingnya inklusi dan partisipasi politik penyandang disabilitas mendorong KPU untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat dan penyandang disabilitas itu sendiri. Ketiga, dorongan dari komunitas disabilitas dan LSM yang peduli terhadap hak-hak penyandang disabilitas juga memainkan peran penting dalam mendorong KPU untuk meningkatkan partisipasi politik mereka.

kemajuan teknologi memberikan dorongan dalam meningkatkan aksesibilitas informasi dan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam proses politik, sehingga KPU dihadapkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi dalam upaya peningkatan partisipasi politik mereka. Kelima, komitmen pemerintah daerah untuk mendukung upaya-upaya inklusi dan partisipasi politik penyandang disabilitas juga menjadi faktor pendorong bagi KPU dalam melakukan langkah-langkah konkret. Dengan memperhitungkan faktor-faktor pendorong ini, KPU Palembang didorong untuk secara aktif terlibat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, memastikan bahwa proses demokrasi menjadi inklusif bagi seluruh warga negara.

Agenda kegiatan pendidikan politik dan teknis penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tidak berjalan lancar karena mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Zamzam Muhammad Fuad berjudul "Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah)", ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat upaya Komisi Pemilihan Umum, yaitu: (1) Kode etik netralitas, (2) Tabrakan jadwal dengan kalender akademik dan pendidikan, (3) Keterbatasan waktu untuk persiapan dan pelatihan, (4) Keterlambatan distribusi identitas, (5) Kurangnya media dan alat sosialisasi, dan (6) Jumlah anggota Relawan Demokrasi Banyumas yang terbatas. Namun, dalam penelitian yang berbeda, peneliti menemukan bahwa faktor-faktor penghambat usaha yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 meliputi: (1) Keterbatasan anggaran, (2) Waktu yang terbatas untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan (3) Kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memahami materi sosialisasi (Zamzam,2015).

3.3 Peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilu presiden tahun 2019 di Kota Palembang

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu Presiden di Kota Palembang memiliki implikasi teoritik yang substansial. Secara teoritik, peran KPU memperkuat dan mendukung gagasan inklusi dalam demokrasi, yang menjadi aspek penting dalam teori demokrasi deliberatif. Partisipasi politik yang ditingkatkan bagi penyandang disabilitas, didorong oleh KPU, menggambarkan aplikasi prinsip-prinsip inklusi, kesetaraan, dan akses yang merata

terhadap hak-hak politik, sebagaimana tercantum dalam teori demokrasi sosial. Selain itu, peran KPU juga berkontribusi pada teori partisipasi politik, yang menekankan pentingnya keterlibatan semua warga negara dalam proses demokratis tanpa diskriminasi, termasuk golongan penyandang disabilitas. Secara teoritik, peran KPU dalam menciptakan aksesibilitas yang lebih baik untuk pemilih penyandang disabilitas menegaskan konsep demokrasi yang inklusif dan merangsang pertumbuhan teoritik dalam upaya mencapai demokrasi yang lebih luas, setara, dan representatif.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Gunawan (2019) dari Universitas Sam Ratulangi dengan judul jurnal Kinerja KPU Dalam Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa kinerja KPU dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, pengetahuan dan pengalaman, relasi antar personal, serta pengawasan. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bahwa kinerja KPU hanya dapat diukur ketika KPU telah menjalankan peran yang melingkupi hak dan kewajibannya, karena hal tersebut merupakan bagian esensial yang memang terlebih dahulu harus dipenuhi (Gunawan, Dkk, 2019).

IV KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis yang di paparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Presiden Di Tahun 2019 Di Kota Palembang sebagai berikut:

1. Peran yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai fasilitator pendidikan politik dan teknis penyelenggaraan pemilihan umum bagi pemilih penyandang disabilitas. Peran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdampak secara signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 berjumlah 407 orang dari total 713 penyandang disabilitas di Kota Palembang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Pada dimensi harapan, perilaku nyata yang diharapkan tercermin dalam harapan-harapan dari berbagai unsur stakeholder dengan spesifikasi sifat yaitu harapan umum, harapan kelompok, dan harapan individual; (2) Pada dimensi norma, dimaksudkan bahwa Komisi Pemilihan Umum harus memegang peran tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Palembang adalah: (1) Faktor pendorong dari upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, seperti tersedianya sarana dan prasarana sosialisasi yang memadai, pendekatan yang efektif, dan produktivitas usia Anggota Komisi Pemilihan Umum; (2) Faktor penghambat dari upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, termasuk anggaran yang terbatas, durasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang singkat, serta keterbatasan pemahaman materi sosialisasi oleh penyandang disabilitas

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan memperdalam fokus penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan sebesar besarnya kepada bawaslu Kabupaten Bandung, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Admin Prokomsetda.2017. *Pengertian,Prinsip,dan Penerapan Good Governance di Indonesia*. Diakses pada 2 September 2023 dari <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id>
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. 1996. *Role Theory: Concepts and Research*.
- . “Op.Cit.”
- Desti, Maria. 2016. *Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung*. (July): 1–2
- Dewanto.2020. Konsep Dasar Penilaian: Pengertian, Tujuan,Prinsip, Fungsi dan Manfaatnya. Diakses pada 1 September 2020 dari <https://www.dewanto-edu.my.id/2020/11/konsep-dasar-penilaian.html>.
- Fuad, Zamzam Muhammad. 2015. Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional* 21(1): 23.
- Gunawan,Pangky,Buce Bonifasius Pati,dan Stefanus Sampe.2019. kinerja relawan demokrasi dalam pendidikan pemilih pada pemilihan umum legislatif di kabupaten bolaang mongondow tahun 2019.*Jurnal Sosial dan Politik*.
- Renita. 2024. *Pengertian Perilaku Adalah : Menurut Para Ahli, Proses Tejadinya, Faktor-faktor yang mempengaruhi, Jenis-jenis, Bentuk-bentuk, dan Proses Pembentukan Perilaku*. Diakses pada 4 Mei 2024 dari <https://www.referensisiswa.my.id/2021/03/pengertian-perilaku-adalah-menurut-para.html>.
- Riadi,Muchlisin. 2022. *Harapan-Aspek,Indikator dan Faktor yang Berpengaruh*. Diakses pada 2 September 2023 dari <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/harapan>.
- Rozak, Abdul. 2024. *Pengertian Sanksi Jenis, dan Contohnya*. Diakses pada 24 Juni 2024 dari <https://dosenppkn.com/pengertian-sanksi/>.
- Nasution. 2016. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan : (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Bandung : Alfabeta.
- Karunia,Vanya. 2022. *10 Definisi menurut para Ahli*. Diakses pada 1 September 2023 dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/11/080000169/10-definisi-norma-menurut-para-ahli>.
- Thabroni, Gamal. 2022. Perilaku Manusia: Teori, Macam, Faktor yang mempengaruhi, dsb. Diakses pada 27 Oktober 2023 dari <https://serupa.id/perilaku-manusia-teori-macam-faktor-yang-mempengaruhi-dsb/>